

MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI DESA KUANHEUN DENGAN PENGELOLAAN BUMDES

Enike Tje Yustin Dima¹, Beatrix Yunarti Manehat²

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira

e-mail: manehatbeatrix@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuanheun masih difokuskan pada usaha simpan pinjam saja padahal Desa Kuanheun memiliki potensi wisata. Pengelolaan usaha simpan pinjam yang buruk berdampak pada tidak maksimalnya BUMDes dalam menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan masalah di atas, maka pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada aparat desa dan masyarakat tentang pengelolaan usaha simpan pinjam dan menggali potensi wisata untuk dijadikan lahan bisnis yang dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi pada 30 orang aparat desa dan masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa aparat desa dan masyarakat memiliki pemahaman tentang prosedur pengajuan simpan pinjam (dimulai dari permohonan simpan pinjam, penandatanganan surat perjanjian simpan pinjam dan analisis kelayakan pinjam) serta cara monitoringnya. Selanjutnya dengan analisis SWOT, ke depannya pemerintah desa akan memaksimalkan BUMDes untuk pengembangan desa wisata. Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran BUMDes untuk perbaikan infrastruktur pada wahana wisata seperti pantai dan gua serta membiarkan masyarakat membuka UMKM sebagai sumber pendapatan. Pemerintah desapun akan secara aktif bekerjasama dengan akademisi untuk memberikan pelatihan pada aparat desa yang dipercayakan pada tugas pengelolaan BUMDes (baik dari segi akuntansi maupun manajemen) agar BUMDes dapat menjadi pendorong ekonomi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat untuk mengawal berjalannya BUMDes juga dapat menjadi kunci keberhasilan kemandirian ekonomi di Desa Kuanheun.

Kata kunci: BUMDes, usaha simpan pinjam, Pengembangan Desa Wisata

Abstract

BUMDes in Kuanheun Village are still focused on savings and loans only, even though they have tourism potential. Poor management of the savings and loan business has an impact on BUMDes not being optimal in carrying out its role as a driving force for the village economy. With the problems above, this community service is carried out to provide understanding to village officials and the community about managing a savings and loan business and exploring tourism potential to be used as new business that can encourage community economic independence. This was carried out using the lecture and discussion method with 30 village officials and the community. The results show that village officials and the community have an understanding of the procedure for applying for a savings loan (starting from a savings and loan application until analyzing the eligibility of a loan) and how to monitor it. Furthermore, with the SWOT analysis, in the future the village government will maximize BUMDes for the development of tourist villages. The government plans to allocate the BUMDes budget for infrastructure improvements in tourist rides such as beaches and caves and allow the community to open MSMEs as a source of income. The village government will also actively cooperate with academics to provide training to village officials who are entrusted with the task of managing so that BUMDes can become a driver of the community's economy. The active participation of the community in overseeing the running of BUMDes can also be the key to the success of economic independence.

Keywords: BUMDes, savings and loan business, Tourism Village Development

PENDAHULUAN

Desa Kuanheun merupakan salah satu desa di Kecamatan Kupang Barat yang dikenal dengan banyaknya gugusan perkampungan. Desa ini secara tipologi wilayah terbentang dan memanjang dari selatan ke utara dengan luas wilayah +2146 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Utara:

Desa Bolok, selatan: Desa Oetmanunu, timur: Kelurahan Batakte, Barat: Laut. Secara administratif Desa Kuanheun terbagi menjadi 5 Dusun, 6 RW, dan 12 RT.

Desa Kuanheun memiliki objek wisata yang berpotensi menjadi ladang bisnis diantaranya Pantai Baliana, Pantai Inokiu, Gua Taunesi serta Gua Oaana (Objek Wisata Baru). Namun, potensi ini belum digarap dengan maksimal karena ketidakpahaman akan konsep bisnis hingga kekurangan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Hal ini terbukti dari belum dirawatnya objek wisata yang ada, masyarakat belum berjualan di area pantai hingga belum mematok harga tarif masuk (gratis) pada wisatawan yang berwisata pada pantai tersebut. Jalan masuk menuju pantai Baliana misalnya, belum diatur dengan baik sehingga keindahan pantai sedikit terhalangi dengan jalan masuk yang belum tertata. BUMDes belum diarahkan untuk memaksimalkan potensi wisata ini. Memaksimalkan potensi wisata penting dilakukan mengingat Hermawan (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, diantaranya: penghasilan masyarakat meningkat; meningkatkan peluang kerja dan berusaha; meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal; meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Pandangan itu dipertegas oleh (Hariyanto, 2016) bahwa kontribusi positif aktivitas pariwisata di desa wisata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat lokal.

Selain itu, berdasarkan pengamatan awal diketahui bahwa BUMDes di Desa Kuanheun hanya berfokus pada simpan pinjam dengan mekanisme simpan pinjam yang masih buruk sehingga menyebabkan banyaknya piutang tak tertagih. Akibatnya BUMDes tidak benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendorong ekonomi masyarakat. Banyak peminjam yang tidak mengembalikan hutangnya sehingga terkesan tidak inovatif serta tidak mampu memberdayakan ekonomi masyarakat padahal tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat yang salah satunya melalui BUMDes adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pemerintah desa tentang pemberdayaan BUMDes melalui pengelolaan bisnis wisata serta bagaimana memaksimalkan usaha simpan pinjam yang ada demi kemandirian ekonomi masyarakat Desa dengan anggaran BUMDes melalui empat tahapan; Pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabatan, diadakan pula monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana BUMDes harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Kemandirian Ekonomi Desa Dengan BUMDes di Desa Kuanheun dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dilakukan dengan cara menjelaskan pentingnya perencanaan model bisnis wisata yang baik (termasuk penganggarannya), bagaimana pengelolaan BUMDes berbasis model desa wisata, cara monitoring dan evaluasi BUMDes. Hal yang sama juga dilakukan untuk Simpan pinjam. Ceramah pada simpan pinjam difokuskan pada bagaimana pengelolaan simpan pinjam dan monitoring serta evaluasinya agar menghindari simpan pinjam macet. Selanjutnya, metode diskusi digunakan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan model bisnis desa wisata dan simpan pinjam dalam mendorong ekonomi masyarakat.

Sasaran yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparat desa dan masyarakat sebanyak 30 orang. Masyarakat turut dilibatkan dengan harapan dapat secara aktif membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonominya serta terlibat aktif dalam kegiatan yang membawa kesejahteraan bagi desa. Bahan dan alat yang digunakan adalah materi-materi terkait BUMDes hingga perencanaan, pengelolaan dan evaluasi bisnis demi menunjang kemandirian ekonomi masyarakat Desa Kuanheun melalui BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa Dengan BUMDes” ini dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur. Kegiatan berlangsung informal dan diawali dengan proses registrasi lalu dilanjutkan dengan penyampaian kepala desa tentang potensi desa serta yang dialami lalu dilanjutkan dengan pemberian materi melalui metode ceramah dan diskusi. Dalam sapaannya kepala desa menyatakan bahwa pemahaman tentang perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi BUMDes masih menjadi pekerjaan rumah bagi Desa Kuanheun. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam anggaran BUMDes yang digunakan untuk simpan pinjam adalah kelalaian membayar angsuran kredit serta tidak adanya sanksi dan prosedur penagihan yang jelas untuk simpan pinjam macet tersebut.



Gambar 1: Penjelasan Aparat Desa tentang kondisi BUMDes Desa

Selanjutnya untuk menanggapi masalah tersebut di atas, Ibu Enike Tje Yustin Dima dalam pemberian materi menggunakan metode ceramah menjelaskan bahwa simpan pinjam merupakan alternatif baik untuk kemandirian ekonomi BUMDes mengingat simpan pinjam bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit hingga Pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif pada usaha simpan pinjam tersebut. Pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota merupakan salah satu bentuk investasi sehingga perlu pengelolaan yang baik.

Dalam menjalankan simpan pinjam sebagai bagian dari pemanfaatan anggaran BUMDes, pemerintah desa perlu memperhatikan unsur yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012:

1. Simpanan pokok: simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja.
2. Simpanan wajib: harus dibayarkan semua anggota setiap bulan.
3. Simpanan sukarela: Simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan.
4. Dana cadangan: Sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota serta diperuntukkan bagi pembiayaan maupun modal tambahan
5. Modal pinjaman: Dipinjam oleh pengurus dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal yang telah ada
6. Hibah atau donasi: Dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usahas

Selanjutnya, simpan pinjam yang macet merupakan bagian dari wanprestasi. Untuk meminimalisir hal tersebut maka langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah desa adalah membuat perjanjian kredit di awal. Perjanjian kredit berisi tentang aturan apa saja yang harus dipenuhi nasabah saat mereka ingin meminjam, termasuk di dalamnya mencakup kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, balas jasa, hingga resiko yang timbul akibat simpan pinjam tersebut. Perjanjian kredit harus merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, agar usaha simpan pinjam dapat berjalan dengan baik maka perlu ada surat permohonan kredit yang berisi informasi tentang data diri pemohon seperti identitas diri, pekerjaan, besaran pinjaman, jangka waktu pinjaman, jumlah harta hingga jaminan yang dibawa oleh pemohon. Penjelasan Ibu Enike ini sejalan dengan pendapat Thalib (2016: 26) serta Oktafiani dan Idris (2015). Selanjutnya, perlu ada penilaian untuk menganalisis permohonan kredit dengan kriteria 5C : *Character* (karakter peminjam), *Capacity* (kemampuan untuk membayar),

Capital (Modal yang dimiliki calon peminjam), *Collateral* (agunan yang diberikan calon debitur), *Condition* (minimal kredit berdasarkan kondisi sekarang maupun masa depan).

Selanjutnya Beatrix Yunarti Manehat dalam pemberian materi tentang pemberdayaan ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata menjabarkan bahwa dengan potensi wisata yang dimiliki, Pemerintah Desa Kuanheun dapat memaksimalkan BUMDes salah satunya untuk pengembangan desa wisata. Wahana wisata merupakan bagian dari aset desa. Pengembangan desa wisata bisa menjadi salah satu strategi pengembangan aset desa. Hal ini sesuai dengan pandangan Hayyuna, dkk (2014), yang menyatakan bahwa strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan aset desa yaitu melalui: Pertama, mengamati lingkungan yang hasilnya dapat mengetahui potensi kegiatan usaha apa yang sesuai untuk diterapkan di BUMDes. Adapun strategi yang dapat digunakan oleh BUMDes meliputi strategi pengembangan produk, penetapan harga, dan strategi keuangan. Kedua, Penyusunan strategi meliputi 1) Pengembangan Produk, 2) Penetapan Harga, 3) Strategi Keuangan. Ketiga, Pelaksanaan Strategi, yang dilakukan oleh BUMDes dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Keempat, Evaluasi atau Kontrol, yang dilakukan oleh Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUMDes di desa.

Melalui pemetaan desa wisata, pemerintah dapat mengelolah pantai dan gua yang dimiliki dengan baik sebagai objek wisata. Memperbaiki akses jalan masuk, memperindah pantai, memberikan tiket masuk bagi para pengunjung, hingga membiarkan masyarakat membuka Usaha mikro dan kecil di sekitar pantai (seperti usaha makanan, minuman hingga fotografi). Ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Modal awal dari anggaran BUMDes dapat dilipatgandakan dengan pemasukan dari usaha tersebut. Ini akan berdampak baik bagi pengelolaan BUMDes dan keefektifan berjalannya BUMDes. Pelatihan berkala juga penting diberikan pada aparat desa pengelola desa wisata baik dari segi akuntansi maupun manajemen bisnis agar usaha tersebut dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta meminimalisir kebangkrutan. Dengan demikian, BUMDes dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan desa.

Dalam pemaparannya Beatrix menjelaskan pula bahwa langkah penting yang harus dilakukan untuk merencanakan Desa Wisata adalah dengan melakukan analisis SWOT tentang kekayaan wisata Desa. Analisis SWOT menggambarkan identifikasi berbagai faktor secara sistematis yang berperan dalam merumuskan strategi BUMDes. Analisis ini berfokus pada memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Matriks SWOT berguna untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Penjelasanannya didasarkan pada pendapat Rangkuti (2015: 21) serta Pratama dan Kurnia (2018).

Desa Kuanheun telah memiliki potensi wisata sebagaimana dijabarkan oleh Yoeti (dalam Dony, 2015), yakni segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Selanjutnya, agar desa Kuanheun dapat menjadi desa wisata yang mandiri maka pemerintah dan masyarakat perlu memperhatikan

- a. Aksesibilitas: yang baik, agar memudahkan wisatawan berkunjung dengan berbagai jenis alat transportasi,
- b. memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata (sebagai contoh: pantai, gua, tarian tradisional, makanan khas, dan lain-lain,
- c. Masyarakat dan aparat desanya siap menerima dan memberikan dukungan yang tinggi
- d. terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya,
- e. Menjamin keamanan desa,
- f. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.

Dengan mempersiapkan semua kriteria di atas, maka pengembangan desa wisata dapat menopang ekonomi masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar, serta meningkatkan perekonomian warga sekitar. Di sisi lain, pengembangan desa wisata dapat pula meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui pengenalan budaya lokal kepada wisatawan, meningkatkan kualitas SDM di desa serta menjadi sarana untuk mendidik masyarakat dalam hal berinteraksi. Selanjutnya ditekankan pula bahwa pelatihan dari sisi akuntansi dan manajemen desa wisata perlu secara konsisten dilakukan agar desa wisata dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, saat diskusi dengan masyarakat berlangsung pada pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar 2: Aparat Desa dan Masyarakat saat mendengarkan penjelasan

SIMPULAN

BUMDes sebagai lembaga pembangkit perekonomian desa harusnya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengoptimalkan asset desa. Untuk dapat efektif menjadi pembangkit ekonomi, usaha simpan pinjam di Desa Kuanheun yang selama ini macet perlu mengarah pada standar mutu seperti perencanaan (perjanjian simpan pinjam, evaluasi kelayakan dan lain-lain) hingga monitor usaha simpan pinjam. Jika ini berlangsung secara kontinu maka usaha simpan pinjam menggunakan anggaran BUMDes dapat menciptakan multi efek bagi ekonomi desa. Selanjutnya, pengembangan menjadi Desa Wisata dengan memanfaatkan potensi desa berupa pantai dan Gua yang indah; dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat hingga membuka peluang terbentuknya UMKM baru dengan masyarakat desa sebagai pelaku usahanya. Analisis SWOT yang tepat diperlukan untuk kemandirian ekonomi berbasis potensi wisata ini. Selain itu, dukungan masyarakat dengan melakukan pengawasan akan turut mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Pelatihan berkala bagi aparat desa yang terlibat dalam manajemen dan proses akuntansi BUMDes penting untuk kualitas program dan kemandirian desa.

SARAN

Perlu ada pelatihan tentang sistem akuntansi yang berbasis sistem demi keakuratan keuangan serta manajemen pemasaran bagi UMKM yang akan terlibat dalam pemasaran di sekitar Pantai dan Gua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini: Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta Pihak Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Giri Pratama, G. K. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus: Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 5(1), 114–1028.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.
- Abdul Thalib. (2016). *Hukum Kontrak Modern*, Pekan Baru: UIR Press.
- Hariyanto, O. I. B. (2016). DESTINASI Wisata Budaya Dan Religi Di Cirebon. *ECODEMICA*, 4(2), 214- 222.
- Hayyuna, Rizka, dkk. 2014. Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gesik). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (1), 1-5.
- Lenny Oktafiani & Irdanuraprida Idris. (2015). Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat. *Lex Jurnalica*, 12 (2), 79-90.
- Rangkuti, Freddy. (2015). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Perkoperasian.